

Analisis Efisiensi Dan Eefktivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Papua Dimasa Pandemi Covid-19

Yana Ameliana Yunus ^{1✉}

Universitas YAPIS Papua, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran efisiensi dan efektivitas belanja modal di Provinsi Papua. Untuk mempelajari masalah ini digunakan penelitian ex post facto. Tipe datanya menggunakan data sekunder untuk periode masa pandemi covid-19. Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besaran belanja tidak langsung masih mendominasi belanja daerah alokasi. Belanja tidak langsung bersifat konsumtif, sedangkan belanja langsung cenderung bersifat jangka pendek dan investasi jangka panjang. Hasil analisis selama tahun masa pandemi covid-19 menggunakan pendekatan konsumsi menghasilkan pertumbuhan, jangka pendek dan fluktuatif. Secara keseluruhan, berdasarkan profil alokasi belanja dapat diketahui bahwa pelaksanaannya belum dilakukan secara efisien dan efektif. Studi ini menyarankan agar dimasa yang Pemerintah Daerah Provinsi Papua dapat meningkatkan alokasi belanja langsung sehingga tercipta keseimbangan dengan pengeluaran tidak langsung. Hal ini bertujuan agar dalam kondisi dalam jangka panjang mampu memberi keuntungan kepada masyarakat karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Belanja Modal; Konsumsi; Modal; Pertumbuhan.*

Abstract

This study aims to describe the efficiency and effectiveness of capital expenditure in Papua Province. To study this problem, ex post facto research was used. The data type uses secondary data for the period of the COVID-19 pandemic. It is collecting data using a documentation study. The results of this study indicate that the amount of indirect expenditure still dominates the allocation of regional expenditures. Indirect spending is consumptive, while direct spending tends to be a short-term and long-term investment. The analysis results during the year during the covid-19 pandemic using the consumption approach resulted in growth, short-term and volatile. Overall, based on the expenditure allocation profile, it can be seen that the implementation has not been carried out efficiently and effectively. This study suggests that the Papuan Provincial Government can increase the allocation of direct expenditures in the future to create a balance with indirect expenditures. This is intended to provide benefits to the community in the long term because it can improve the welfare of the community as a whole and sustainably.

Keywords: *Capital Expenditures; Consumption; Capital; Growth.*

Copyright (c) 2021 Yana Ameliana Yunus

✉ Corresponding author :

Email Address : yana.ameliana@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional pemerintah maupun swasta seperti pembelian tanah, pembelian mesin, dan peralatan, konstruksi gedung, jalan, instalasi, jaringan dan aset tetap lainnya. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan mempengaruhi daerah pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja modal juga akan menggerakkan roda ekonomi daerah. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi dalam permodalan pemerintah melakukan pengeluaran termasuk belanja modal untuk perolehan tanah, bangunan dan gedung, peralatan dan aset tidak berwujud. Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah bahwa Yang dimaksud dengan aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dalam pemerintahan, perencanaan dan pengendalian belanja modal merupakan kegiatan yang penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah (Aulya et al., 2016; Dincă, 2019; Quinton, 2018; Rampersad, 2013; Schnellenbach & Schubert, 2015), karena pembelanjaan yang dilakukan tanpa perencanaan yang baik dan dalam pelaksanaannya tidak terkontrol dengan baik juga akan menjadi pemborosan keuangan daerah (Pratiwi et al., 2019; Isma et al., 2017; Niswaty et al., 2016; Saggaf et al., 2014; Salam & Rosdiana, 2015). Khan, (2019) menjelaskan bahwa perencanaan yang tidak baik akan berdampak terhadap pada kerugian masyarakat khususnya pada masyarakat kecil yang akan merasakan langsung dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika belanja modal adalah dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif akan berdampak baik bagi masyarakat kesejahteraan. Prinsip dalam penganggaran adalah Ekonomis, Efisien dan Efektif Value For Money merupakan salah satu penerapan good governance. Sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, maka pemahaman tentang konsep pembelanjaan sangatlah penting. Oleh pemahaman konsep belanja, perencanaan dan pengendalian belanja modal akan lebih mudah dilakukan.

Secara konseptual, dalam belanja daerah terdapat dua sisi yang berbeda namun saling berkaitan terkait, yaitu kebijakan pengeluaran dan manajemen pengeluaran. Belanja daerah kebijakan terkait dengan penetapan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, sedangkan pengelolaan belanja daerah terkait dengan cara pelaksanaan belanja untuk membiayai kegiatan pemerintah sehingga dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif. Daerah kebijakan pengeluaran dilakukan pada tahap perencanaan dan pengelolaan pengeluaran dilakukankeluar pada tahap implementasi. Biasanya kebijakan pembelanjaan lebih bersifat politis dan pembelanjaan manajemen bersifat teknis. Kebijakan belanja akan memengaruhi manajemen belanja, dan pada dasarnya manajemen belanja akan menyesuaikan dengan kebijakan belanja (Pratiwi et al., 2019; Saggaf et al., 2017).

Indonesia dengan dengan wilayah yang luas, tentu membutuhkan suatu system pemerintahan (governance) yang baik. Sistem ini sangat baik di perlukan sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah dan sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang di hadapi dengan koridor-koridor kehidupan nasional. Pembangunan ekonomi diarahkan pada mantapnya ekonomi nasional dalam

mewujudkan demokrasi ekonomi. Salah satu ciri demokrasi ekonomi adalah perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antara daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendaya gunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal. Upaya peningkatan pembangunan daerah harus didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pemerintah membangun di seluruh tanah air. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu lapangan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Adapun masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan ciri khas daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber fisik secara lokal (daerah).

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif dalam memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal dalam membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat. (Todaro : 1999) Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selalu menciptakan pertumbuhan ekonomi, pembangunan harus berupaya untuk menghapus atau mengurangi kemiskinan.

Studi ini dilakukan di Kabupaten Papua. Seperti diketahui bahwa Papua masih relatif muda dalam usia pemerintahan, tetapi Kabupaten ini merupakan pusat kegiatan perekonomian sejak masih menjadi bagian dari Kabupaten Papua. Dengan terbentuknya Kabupaten Papua menjadi pemerintahan sendiri akan lebih menjanjikan dalam pengembangan perekonomian dimasa mendatang, terutama di era otonomisasi seperti sekarang ini. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan tersebut berasal dari APBD. Seharusnya dengan adanya otonomi daerah maka daerah-daerah harus mengelola keuangan daerahnya secara baik. Menurut (Mardiasmo, 2002), perlimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan, dan sumber daya nasional berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena hal ini berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah, dan ternyata realisasi seringkali tidak sesuai dengan target, disini timbul pertanyaan mengapa demikian? karena hal ini berkaitan dengan dana pembangunan. Kalau pengelolaan keuangannya sudah efisien dan efektif ini berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan kalau pengelolaannya belum efisien dan efektif maka perlu untuk didorong atau digenjut lagi agar supaya pengelolaannya akan lebih membaik dan ini akan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan itu sendiri, sehingga hal ini akan menjamin kemandirian keuangan daerahpun semakin lama semakin membaik.

Pendapatan asli daerah merupakan indikator kemandirian suatu daerah. Artinya semakin meningkatnya proporsi penerimaan PAD terhadap keseluruhan penerimaan pendapatan daerah yang ditunjukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah tersebut menunjukkan kemandirian dalam hal pembiayaan pembangunan daerahnya. Untuk mengembangkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen

keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Elemen manajemen keuangan daerah yang di perlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi akuntabilitas, value for money, kejujuran dalam mengelola keuangan public, transparansi dan pengendalian (Devas et al., 1989)

Dalam rangka pertanggungjawaban public, pemerintah daerah melakukan optimalisasi anggaran yang di lakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukan bahwa manajemen keuangan daerah masih kurang efektif. Anggaran daerah khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai kontributor dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaan belanja, dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, memungkinkan untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal dalam rangka peningkatan dan memenuhi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan diberikan untuk menetapkan tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, menetapkan prioritas, dan menetapkan rasionalharga satuan. Berdasarkan data imprint belanja yang dianggarkan oleh Provinsi Papua pemerintah pada tahun 2020 sebesar Rp. 338.457.682.430,- dengan realisasi sebesar Rp.321.0884.680.925 atau 94,56% dari target. Total belanja modal dari total belanja adalah 17,24%. Jika dihitung dari total pendapatan, belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah adalah 17,74%. Sedangkan pada tahun 2021 total belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp. 302.432.998.692, -dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 275.180.935.215 atau 90,98%. Sementara itu, total modalbelanja daerah sebesar 12,89% dari total belanja daerah. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2020 ini jumlahnya justru menurun, baik untuk nilai absolut maupun relatif. Data di atas menunjukkan nilai yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun dalam memenuhi alokasi anggaran tidak ada aturan berapa besar belanja modal yang harus dialokasikan oleh pemerintah daerah pada setiap tahun anggaran, tetapi mengingat tujuan utama otonomi dan desentralisasi fiskal dimana daerah diberi kewenangan untuk mengurus sendiri rumah tangga, sehingga menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk merelokasi anggaran untuk belanja produktif dengan menciptakan birokrasi yang efisien dan mampu memberikan kualitas yang baik pelayanan publik. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji apakah belanja modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua telah dilaksanakan keluar secara efisien dan efektif.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif Ex Post Facto. Penelitian deskriptif ini adalah dianggap cocok agar penelitian dapat mengkaji fenomena tersebut secara lebih mendalam dan luas dengan apa yang terjadi dan berkembang dalam situasi sosial yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Sumber data yang digunakan dalam hal ini penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah pejabat yang dianggap memiliki kompetensi di bidang keuangan daerah khususnya yang berkaitan dengan perencanaan daerah, yaitu: Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa Pemerintah Provinsi Papua Laporan Keuangan, data BPS, sumber lain yang

relevan. Jangka waktu yang digunakan terdiri dari time series data selama lima tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Penggunaan data time series agar penelitian lebih banyak akurasi terjamin. Data yang digunakan dikumpulkan dengan berbagai cara, yaitu; pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

Teknik observasi dilakukan dengan menelusuri sumber data tentang unsur-unsur yang menjadi dasar perencanaan dan alokasi belanja modal. Wawancara tekniknya yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan kunci yang bekerja di wilayah keuangan dan memiliki kompetensi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah belanja modal di Provinsi Papua. Anggaran belanja modal yang dimaksud adalah aset tetap yang diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi dalam operasi entitas kegiatan. Aktiva tetap diklasifikasikan sebagai berikut; a)sebuah daratan; b)peralatan dan mesin; c)bangunan dan gedung; d) jalan, irigasi, dan jaringan; e) aset tetap lainnya; dan f)konstruksi sedang berlangsung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa keuangan. Penggunaan analisis keuangan dianggap tepat untuk menginterpretasikan angka-angka laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat memberikan makna tertentu yang berguna untuk pengambilan keputusan. Teknik analisis keuangan dimaksudkan untuk menganalisis varians, analisis rasio belanja operasional, belanja modal, belanja tentatif, dan transfer terhadap total belanja, rasio belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja, dan pertumbuhan belanja. Kemudian rasio keuangan dianalisis secara deskriptif (Creswell & Creswell,2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Ekonomi

Pengertian terhadap masalah pembangunan ekonomi makin berkembang dan bertambah luas, yang terlihat makin banyak segi-segi yang diperhatikan dalam mengevaluasi suatu proses pembangunan ekonomi. Nampaknya terjadi suatu evaluasi pemikiran para ahli ekonomi dalam menentukan batasan ruang lingkup pembangunan. Mula-mula cukup dengan melihat perkembangan tingkat pendapatan perkapita masyarakat, tetapi sekarang cenderung untuk melihat pembagian hasil yang lebih merata akibat perkembangan ekonomi, baik secara sektoral maupun secara wilayah. Menurut Lincoln Arsyad (2005 : 22-23) pembangunan ekonomi adalah seperti suatu proses agar saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut bisa diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan kegiatan ekonomi dan taraf kehidupan masyarakat berikutnya. Pembangunan perlu dipandang sebagai kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Malthus, dalam bukunya Jhingan M.L. (1983:452) berpendapat bahwa dia tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malahan proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten di pihak rakyat. Dia tidak memberikan gambaran adanya gerakan menuju stasioner tetapi menekankan bahwa perekonomian mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi. Jadi menurut Malthus proses pembangunan ekonomi lebih dari sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Sukirno S. (2006:3-4)

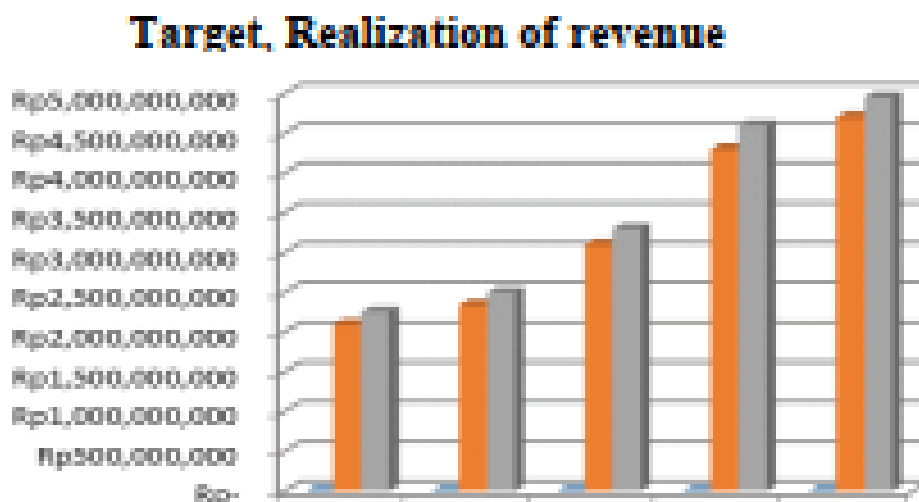
di dalam bukunya mengatakan bahwa pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari hal ini di harapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan akan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi.

Dalam analisis pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai proses, supaya saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi dapat dilihat. Dengan cara analisis ini dapat diketahui deretan peristiwa yang akan timbul dan akan mewujudkan peningkatan dan dalam taraf kesejahteraan masyarakat dalam suatu tahap pembangunan ke tahap

Efisiensi dan Efektivitas

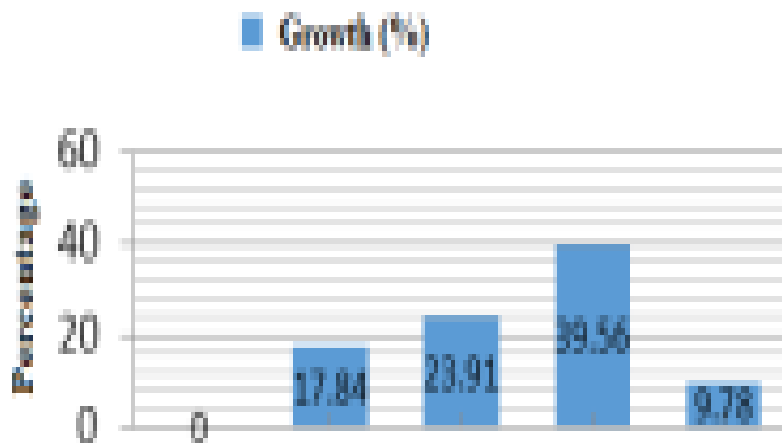
Sektor public sering di nilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Oleh karena itu Mardiasmo (2004:4) mendefinisikan bahwa Efisiensi adalah pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Yang di kaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan. Efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang di tetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang di maksud bermacam-macam, tergantung dari pada sasaran atau tujuan yang ingin di capai atau yang telah di tetapkan. Adapun pengertian efektivitas yang didefinisikan oleh Hans Kartikahadi dalam Agoes Sukirno (2000;180) adalah produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik di tinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang di targetkan. Sedangkan untuk Efisiensi di definisikan sebagai bertindak dengan cara yang dapat meminimalisir kerugian atau pemborosan sumberdaya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu Agoes Sukirno (2000;180) mendefinisikan efektivitas sebagai "perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan, sampai dengan pencapaian tujuan yang di tetapkan, baik di tinjau dari kuantitas (volume) hasil kerja, kualitas hasil kerja maupun batas waktu yang di targetkan". Dan Efisiensi sebagai "bertindak untuk membuat pengorbanan yang paling tepat di bandingkan dengan hasil yang di kehendaki". Suatu organisasi di anggap efektif, bila bisa mencapai tujuan dengan efisien, hemat dan mentaati peraturan yang berlaku. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah Provinsi Papua harus menerapkan prinsip kedaerahan pengelolaan pengeluaran secara cermat, konsisten dan berkelanjutan. Optimalisasi dari pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan 2 aspek yaitu pendapatan dan belanja, namun pengelolaan belanja daerah perlu mendapat perhatian yang cukup besar dari penerimaan pengelolaan. Berdasarkan hal tersebut, meskipun fokus kajiannya adalah belanja daerah, namun tak salah jika masih disuguhkan gambaran luasnya Provinsi Papua APBN periode masa pandemi covid-19. Dalam hal pelaksanaan anggaran, mungkin ada perbedaan antara pendapatan daerah dan pengeluaran, penyebabnya bisa sangat beragam, tetapi surplus dan defisit daerah yang muncul harus disikapi oleh daerah dengan

kebijakan pembiayaan daerah. Besarnya pendapatan dan realisasi anggaran Provinsi Papua periode masa pandemi covid-19 ditunjukkan pada Gambar 1. Target, Realisasi pendapatan. Pencapaian Penghasilan Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Papua. Gambar 1 Target, Realisasi dan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua tahunmasa pandemi covid-19 Berdasarkan Gambar 1, tampak bahwa realisasi penerimaan Provinsi Papua pada tahun periode 5 tahun (masa pandemi covid-19) rata-rata 97,13%.



Gambar 1. Target, Realisasi pendapatan

Padahal prestasinya belum mencapai 100%, aspek pertumbuhan pendapatan Provinsi Papua dapat dikatakan bagus. Selanjutnya, data penyajian pertumbuhan pendapatan Provinsi Papua di Periode masa pandemi covid-19 ditunjukkan pada Gambar 2. Pertumbuhan Pendapatan Target dan Realisasi Belanja Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Papua Gambar 2 Pertumbuhan Pendapatan, Target dan Realisasi Belanja Provinsi Papua Tahun masa pandemi covid-19. Gambar 2 menyajikan rata-rata pertumbuhan yang dicapai sebesar 18,22% per tahun. Namun,. Sedangkan rata-rata belanja daerahdicapai di Provinsi Papua dalam kurun waktu 5 tahun yaitu masa pandemi covid-19 adalah 91,73%. Tampak pula bahwa realisasi belanja dari tahun ke tahun cenderung meningkat, namunpada tahun 2021 menurut Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3. Realisasi Belanja Pertumbuhan Belanja Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Papua. Gambar 3 Realisasi dan Pertumbuhan Belanja Provinsi Papua Tahun masa pandemi covid-19.Berdasarkan Gambar 3, rata-rata belanja daerah yang dicapai Provinsi Papua dalam rentang waktu masa pandemi covid-19 adalah 91,73%. Tampak pula bahwa realisasi belanja daritahun ke tahun cenderung meningkat, namun pada tahun 2021 menurut Di era otonomi daerah, daerah pemerintah harus mampu mengendalikan belanja daerah, meningkatkan efisiensi belanja dan menghemat anggaran. Pertumbuhan belanja Provinsi Papua mengalami bukti ekstrem.



Gambar 2. Pertumbuhan dan presentasi target

Tahun 2020 pertumbuhannya mencapai 24,07%, pada tahun 2021 hanya meningkat 17,15% dibandingkan tahun 2020, namun pada tahun 2021 meningkat drastis sekitar 27,61% dibandingkan tahun 2020. Setelah itu, pertumbuhan justru menurun menjadi 23,61% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat tajam hanya 3,92%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Akuntansi Pemerintahan Standar sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam format belanja modal, belanja tentatif dan transfer. Besaran masing-masing klasifikasi anggaran belanja di Papua Provinsi untuk periode 5 tahun dari masa pandemi covid-19. Secara umum, belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan peningkatan tersebut adalah biasanya berkaitan dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan ruang lingkup pelayanan publik yang akan dilakukan oleh pemerintah, dan penyesuaian terhadap faktor ekonomi makro. Tampak bahwa porsi belanja daerah untuk belanja operasional mendominasi secara rata-rata 72,32% pada periode masa pandemi covid-19. Belanja operasional adalah belanja yang manfaat dikonsumsi dalam satu anggaran, sehingga pengeluaran operasional bersifat jangka pendek dan dalam kasus tertentu itu rutin atau berulang. Belanja modal adalah belanja yang dialokasikan untuk investasi pada tahun anggaran yang bersangkutan. Di dalam berbeda dengan pengeluaran investasi pada tahun anggaran yang bersangkutan.



Gambar 3. Pertumbuhan perbelanjaan

Berbeda dengan jangka pendek dan belanja operasional rutin, belanja modal menyediakan jangka menengah dan jangka panjang manfaat dan tidak rutin. Pada periode masa pandemi covid-19 rata-rata belanja modal Selatan Provinsi Sulawesi sebesar 11,80%. Belanja modal akan mempengaruhi keseimbangan pemerintah daerah lembar, yang akan menambah aset daerah. Transfer atau biasa disebut dengan pengeluaran bagi hasil dan bantuan keuangan, adalah bagi hasil bagi pendapatan daerah yang ditetapkan dengan undang-undang. Pada periode masa pandemi covid-19 rata-rata belanja transfer Pemerintah Provinsi Papua sebesar 15,83%. keuangan ini belanja bantuan diberikan kepada kabupaten/kota atau desa di wilayah Papua Propinsi. Untuk mengetahui pertumbuhan masing-masing klasifikasi pengeluaran, dapat dijelaskan bahwa masing-masing jenis pertumbuhan pengeluaran berfluktuasi, pertumbuhan yang paling ekstrim adalah pengeluaran tak terduga. Sedangkan pertumbuhan belanja operasional cukup menonjol yaitu pada tahun 2020 sebesar 58,09%, sedangkan pada tahun 2021 menurun drastis hanya tumbuh 1,07%. Demikian juga pada pertumbuhan modal tertinggi pengeluaran tahun 2020 sebesar 54,02%, sedangkan tahun 2021 hanya 2,63%. Pada tahun 2020 pertumbuhan menurun hingga mencapai 19,36% dan pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 29,98%. Pertumbuhan rata-rata transfer adalah 19,46% per tahun. Selain analisis klasifikasi berdasarkan periode waktu yang dinikmati untuk ini belanja, yaitu belanja operasional, belanja modal, belanja tentatif dan pemindahan yang dilakukan, perlu dilakukan analisis terhadap klasifikasi berdasarkan kegiatan, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Analisis ini diperlukan guna kepentingan manajemen intern pemerintah daerah dalam pengendalian biaya dan pengendalian anggaran (biaya dan pengendalian anggaran). Untuk periode masa pandemi covid-19 klasifikasi langsung dan tidak langsung belanja dijelaskan bahwa belanja pemerintah daerah di Provinsi Papua adalah didominasi oleh pengeluaran tidak langsung. Rata-rata pengeluaran pada periode masa pandemi covid-19 adalah 65,80%, sedangkan pada saat yang sama rata-rata belanja langsung sebesar 34,20%. Pengeluaran langsung harus lebih besar dari pada belanja tidak langsung, karena belanja langsung akan sangat mempengaruhi kualitas keluaran kegiatan. Analisis akan dilanjutkan dengan analisis pertumbuhan untuk mengetahui pertumbuhan kedua jenis pengeluaran. Dapat dijelaskan bahwa: 1) Pertumbuhan rata-rata langsung pada periode masa pandemi covid-19 sebesar 18,47% dan 2) Pertumbuhan rata-rata belanja tidak langsung periode 2009 -2013 sebesar 30,51%. Pertumbuhan belanja langsung (BL) hanya sekitar 60% dari belanja tidak langsung (BTL), sedangkan belanja langsung (BL) sangat menentukan kualitas output kegiatan. Langsung Pengeluaran adalah belanja modal dan barang/jasa yang merupakan investasi. Istilah dari makroekonomi, belanja pegawai dan belanja lainnya disebut kebocoran, sedangkan modal pengeluaran adalah suntikan investasi. Pertumbuhan kedua pengeluaran ini juga sangat lincah.

Sejak berlakunya UU Otonomi Daerah, penyelenggaraan pemerintahan tugas pembangunan daerah termasuk pelayanan publik dibiayai oleh Daerah Anggaran. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Harapan Pendapatan dan Belanja Daerah juga dapat dikatakan sebagai pemicu dan penentu tercapainya sasaran dan sasaran ekonomi makro suatu daerah. Sasaran dan sasaran yang dibuat

oleh pemerintah daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan hambatan yang ditemukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di luar Jawa yang pendapatannya realisasi selama 5 tahun yaitu masa pandemi covid-19 rata-rata 97,13%. Prestasinya bisa dikatakan kurang baik, karena pendapatannya harus lebih besar dari target. Sedangkan rata-rata pertumbuhan pendapatan dicapai sebesar 18,82% per tahun dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pencapaian ini merupakan pencapaian yang baik. Namun perlu dilakukan analisis terhadap perhitungan potensi pendapatan, potensi ini tidak harus direalisasikan seluruhnya dalam satu fiskal tahun tetapi dapat dilakukan secara bertahap hingga beberapa tahun fiskal (Fox et al., 2002; Freire-González, 2018). Merencanakan anggaran pendapatan merupakan hal penting yang harus terlebih dahulu dilakukan perusahaan pemerintah sebelum menentukan besaran anggaran belanja, hal ini telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan bahwa setiap pengeluaran yang dianggarkan harus didukung dengan kepastian ketersediaan pendapatan dalam jumlah yang cukup (Adie, 2019; Khan, 2019; Wong, 2006). Pendapatan perencanaan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan pemerintah dalam menyediakan pelayanan dan melaksanakan kebijakan alokasi, distribusi anggaran, serta menetapkan kebijakan surplus/defisit anggaran, dan penetapan arah kebijakan pembiayaan anggaran.

Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif, Pengelolaan belanja harus berorientasi untuk mewujudkan tiga hal yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pengelolaan belanja daerah harus fokus pada penerapan disiplin anggaran. Sedangkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, pengelolaan belanja harus fokus pada efisiensi dan efektivitas anggaran alokasi dalam berbagai program kegiatan pembangunan. Untuk alasan ini, tujuan utama dari manajemen pengeluaran adalah untuk memastikan disiplin fiskal melalui pengendalian pengeluaran, alokasi harus sesuai dengan kebijakan dan prioritas serta perencanaan penganggaran yang terjamin prinsip, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan profil pengeluaran secara umum dapat dikatakan bahwa alokasi belanja daerah belum dilakukan secara ekonomis, secara efisien dan efektif.

SIMPULAN

Hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa profil wilayah alokasi belanja pemerintah Papua selama 5 tahun yaitu masa pandemi covid-19, yaitu: 1) Aspek target dan realisasi cukup baik, capaian yang dicapai rata-rata sebesar 91,73%, artinya realisasi Pemerintah Daerah pengeluaran anggaran tertentu. Varians atau selisih yang terjadi merupakan varians yang menguntungkan atau diutamakan, 2) Aspek pertumbuhan belanja, belanja daerah cenderung meningkat pada pertumbuhan rata-rata sebesar 18,11% per tahun, hal ini dianggap relatif baik, 3) Aspek pengeluaran berdasarkan manfaat, didominasi oleh yaitu biaya operasional, dengan rata-rata 72,32%. Sedangkan belanja modal hanya 11,80% sedangkan belanja modal merupakan investasi untuk jangka panjang, 4) aspek pengelompokan pengeluaran berdasarkan kegiatan yang didominasi oleh pengeluaran tidak langsung yang sejalan dengan pengeluaran operasional yang rata-rata 65,80% per tahun. Sementara pengeluaran langsung hanya sekitar setengah dari pengeluaran tidak langsung, yaitu rata-rata 34,20% per tahun, 5) aspek pertumbuhan

pengeluaran, baik berdasarkan klasifikasi manfaat dan kegiatan cenderung berfluktuasi ekstrim, tetapi rata-rata baik. Berdasarkan pada profil belanja umum dapat dikatakan bahwa alokasi belanja daerah memiliki belum dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Referensi :

- Adi, PGK (2019). Analisis Capital Budgeting untuk Menilai Kelayakan Usaha Karaoke. *Tinjauan Kebijakan PINISI*, 3 (1), 47-52.
- Aulya, R., Mindarti, LI, & Amin, F. (2016). Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Pariwisata Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Tata Kelola (Studi di Pariwisata SidomulyoDesa, Kota Batu). *Jurnal Ad'ministrare*, 3 (2), 11-30.
- Creswell, JW, & Creswell, JD (2017). *Desain penelitian: Kualitatif, kuantitatif, dan campuranmetode pendekatan*. Publikasi bijak.
- Dincă, V. (2019). Penentu adopsi komputasi awan oleh UKM Rumania di dunia digitalekonomi. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 20 (4), 798-820.<https://doi.org/10.3846/jbem.2019.9856>
- Fox, T., Ward, H., & Howard, B. (2002). Peran Sektor Publik Dalam Penguatan PerusahaanTanggung Jawab Sosial : Studi Dasar Penguatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: AStudi Dasar . Bank Dunia.
- Freire-González, J. (2018). Perpajakan lingkungan dan hipotesis dividen ganda di CGEliteratur pemodelan: Sebuah tinjauan kritis. *Jurnal Pemodelan Kebijakan*, 40 (1), 194-223.<https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2017.11.002>
- Isma, EW, Darwis, M., Saleh, S., & Salam, R. (2017). ! 2020. Hal 203-212
- Arsyad Lincolin, 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi kedua, Penerbit BPFE Yogyakarta
- C.S.T.Kansil, 2001, *Sistem pemerintahan Indonesia*, penerbit Bumi Aksar.
- Devas,Nick Brian Binder,Anne Booth,Kenneth Davey and Roy Kelly,1989, *Kuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press,Jakarta
- Halim Abdul, 2004, *akuntansi sector publik keuangan daerah*, penerbit Salemba Empat Jakarta
- Jhingan (1997), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Penebit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro Mudrajat, 2004, *otonomi dan pembangunan daerah*, penerbit Erlangga Jakarta
- Koncoro Mudrajad,1995,*Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan*, Majalah Prisma, No, 3-17.
- Mardiasmo, 2004 *efisiensi dan efektifitas*, penerbit Andy Jakarta
- Nurlan Darise, 2006, *pengelolaan keuangan daerah*, penerbit Indeks Jakarta
- Saragih Juli Panglima,2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*,Penerbit Ghalia Indonesia,Jakarta.
- Soetisna Momon, Sandjaya, dan Syahraan Basah, studi kasus tentang Otonomi Daerah
- Sukirno Sadono, 2006. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-2, Penerbit Kencana Predana Media Group
- Suparmoko M.A ,2002,*Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi pertama,penerbit Andi,Yogyakarta.
- Suparmoko,M.A., 2003. *Kuangan Negara dalam teori dan praktek*, Edisi ke-5, Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Pedoman Penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan Daerah & Hibah untuk Daerah, penerbit Bp.Cipta Jaya. Jakarta
- Suseno, T, Widodo. (1999). *Pengantar Ekonomi Makro*. Penerbit Erlangga Jakarta
- Todaro M. P, (1997) *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Jilid 1. Penerbit Erlangga

Jakarta

Badan Pusat Statistik, Kabupaten Minahasa Utara Dalam Angka, Beberapa edisi Undang-Undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004, Penerbit Sinar Grafika
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Fokusmedia, Bandung

Undang-undang otonomi daerah, edisi revisi tahun 2006, Penerbit Fokusmedia, Bandung
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerbit Fokusmedia, Bandung